

ABSTRAK

JEJARING KELEMBAGAAN DALAM PENANGGULANGAN KDRT DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

RAISYA DHANIELLA AURELIA ARNALDO

Angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Bandar Lampung menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini memerlukan kerja sama terintegrasi antara aktor pemerintah dan non pemerintah dalam penanggulangannya. Kerja sama ini didasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jejaring kelembagaan dalam penanggulangan KDRT di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan teori jejaring kelembagaan (*network institutionalism*) dari Christopher Ansell dengan fokus pada struktur jaringan, hubungan antar aktor, dan akses terhadap sumber daya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi terhadap aktor-aktor terkait, yaitu DP3A, UPTD PPA, Unit PPA Polresta, serta lembaga non pemerintah, yaitu Perkumpulan DAMAR, PKBI Lampung dan LBH Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur jaringan kelembagaan masih bersifat terpusat dan cenderung formal monopolistik, dengan dominasi aktor pemerintah sebagai pusat koordinasi. Kondisi ini membatasi koordinasi dan komunikasi, strategi serta kerja sama, dan tingkat kepercayaan serta komitmen antar aktor. Selain itu, kondisi tersebut juga menghambat pemerataan akses terhadap sumber daya, baik dalam hal perolehan maupun pemanfaatannya, termasuk dukungan antar aktor, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas jejaring.

Kata kunci: jejaring kelembagaan, penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga

ABSTRACT

NETWORK INSTITUTIONALISM IN THE PREVENTION OF DOMESTIC VIOLENCE IN BANDAR LAMPUNG CITY

By

RAISYA DHANIELLA AURELIA ARNALDO

The incidence of domestic violence in Bandar Lampung City has shown an upward trend in recent years. This requires integrated cooperation between government and non government actors to address the issue. This cooperation is based on Lampung Province Regional Regulation Number 2 of 2021 on the Elimination of Violence Against Women and Children. This study aims to analyze the institutional network in addressing DV in Bandar Lampung City. This study employs Christopher Ansell's theory of institutional networkism, focusing on network structure, relationships among actors, and access to resources. The method used is descriptive qualitative, with data collection techniques involving in-depth interviews and documentation of relevant actors, namely the DP3A, UPTD PPA, PPA Unit Polresta, as well as non governmental organizations, namely the Perkumpulan DAMAR, PKBI Lampung, and LBH Bandar Lampung. The research findings indicate that the institutional network structure remains centralized and tends toward formal monopolistic patterns, with government actors dominating as the central coordinating body. This situation limits coordination and communication, strategy and cooperation, as well as the level of trust and commitment among actors. Furthermore, it also hinders equitable access to resources both in terms of acquisition and utilization including support among actors, which ultimately impacts the network's effectiveness.

Keywords: *institutional networks, domestic violence prevention*